

---

---

## Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm): Studi Kasus KTH Sari Hutan di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara

Pirka Yanti<sup>1\*</sup>, Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email Correspondence: pirkayanti01@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Peran Perempuan;  
Perhutanan Sosial; Hutan  
Kemasyarakatan (HKm);  
Tata Kelola Hutan;  
Kesetaraan Gender; KTH  
Sari Hutan

### Abstrak

Program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dalam implementasinya, keterlibatan masyarakat sering kali menunjukkan perbedaan peran berdasarkan gender, di mana perempuan kerap menghadapi hambatan nilai dan norma sosial dalam mengakses serta mengelola sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan tersebut pada KTH Sari Hutan di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan secara sensus terhadap 7 anggota perempuan KTH Sari Hutan, serta pemilihan informan secara purposive sampling. Analisis data menggunakan teknik skoring dengan skala Likert pada tiga aspek utama: tata kelola kawasan, tata kelola usaha, dan tata kelola kelembagaan. Secara keseluruhan, perempuan di KTH Sari Hutan memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam pengelolaan HKm. Berdasarkan hasil normalisasi, peran perempuan paling dominan berada pada tata kelola kawasan (41,7%), diikuti oleh tata kelola usaha (36,5%), dan paling rendah pada tata kelola kelembagaan (21,8%). Tingginya partisipasi pada aspek teknis (kawasan dan usaha) terlihat dari keterlibatan aktif dalam penanaman, pemanenan, hingga pengolahan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). Meskipun keterlibatan fisik dan operasional perempuan sangat tinggi, partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat kelembagaan masih terbatas karena posisi

---

kepemimpinan yang didominasi laki-laki. Keterlibatan ini dipengaruhi oleh faktor sosial (budaya patriarki), tingkat pendidikan yang mayoritas rendah (SD-SMP), struktur kelembagaan, serta motivasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

---

**Keywords :**

*Women's Role; Social Forestry; Community Forest (HKm); Forest Governance; Gender Equality; Sari Hutan Forest Farmer Group (KTH)*

**Abstract**

*The Social Forestry Program through the Community Forest (HKm) scheme is a government initiative aimed at improving community welfare while preserving forest sustainability. In its implementation, community participation often reflects gender-based differences in roles, where women frequently face constraints rooted in social values and norms when accessing and managing forest resources. This study aims to examine the level of women's involvement in HKm management and to identify the factors influencing such participation within the Sari Hutan Forest Farmer Group (KTH) in Bokin Village, Rantebua Subdistrict, North Toraja Regency. This research adopts a descriptive approach by integrating both quantitative and qualitative methods. Data were collected through field observations, in-depth interviews, literature review, and documentation. Respondents were determined using a census method involving all seven female members of KTH Sari Hutan, while key informants were selected through purposive sampling. Data analysis employed a scoring technique based on a Likert scale across three main aspects: area governance, business governance, and institutional governance. Overall, women in KTH Sari Hutan demonstrate a high level of involvement in HKm management. Based on normalization results, women's roles are most dominant in area governance (41.7%), followed by business governance (36.5%), and lowest in institutional governance (21.8%). The high level of participation in technical aspects (area and business governance) is evident in their active involvement in planting, harvesting, and processing non-timber forest products (NTFPs). However, despite strong physical and operational engagement, women's participation in strategic decision-making at the institutional level remains limited due to male-dominated leadership structures. This level of involvement is influenced by social factors (patriarchal culture), generally low levels of education (elementary to junior high school), institutional structures, and economic motivations to support household needs.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Eskalasi kemajuan perekonomian dalam konteks global sangat memiliki determinansi atas dinamika perilaku sosial ekonominya masyarakat, khususnya masyarakat yang berdomisili di wilayah hutan pada tataran melakukan pemenuhan atas kebutuhan primernya. Mengamati keadaan kian padatnya jumlah penduduk serta banyaknya pengangguran, menjadi aspek fundamental yang memberikan dorongan terhadap masyarakat di sekitaran hutan guna dapat memberdayakan lahannya yang tersedia pada sekitaran hutan tersebut. Pemberdayaan hutan yang dijalankan masyarakat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang kini sudah mengalami perubahan sebagai Perhutanan Sosial (Lispiani dan Hidayati, 2022).

Program perhutanan sosial (PS) yakni satu diantara beragam usaha yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi terjadinya kerusakan kawasan hutan. Program ini bertujuan guna mengeskalisasikan kesejahteraannya masyarakat lewat pola pemberdayaan serta senantiasa tetap mengacu kepada aspek kelestariannya. Perhutanan sosial memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (berkelanjutan) dan meningkatkan keberlanjutan penghidupan mereka (Atmojo et al., 2024).

Hutan Kemasyarakatan (HKM) ialah hutan negara yang dikhususkan dalam pemberdayaannya bertujuan guna memberdayakan masyarakat sekitar. Peraturan yang mengatur mengenai HKM yaitu Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.37/Menhut II/2007 (Fauzi, 2021). Kemunculan HKM tentu akan mengikutsertakan keterlibatannya masyarakat di sekitaran hutan dalam tataran langsung. Keterlibatan masyarakat akan memunculkan diversifikasi, khususnya diversifikasi gender. Pada pengelolaannya hutan perempuan serta laki-laki mempunyai porsi kontribusi yang beraneka ragam, baik pada penentuan pekerjaannya ataupun aktivitas kegiatan yang wajib dilaksanakan pada pengelolaannya hutan, yakni tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, serta tata kelola usaha (Pratiwi, 2018).

Kebijakan yang sensitif gender, butuh melakukan pengakomodasian keadaan bahwasanya perempuan tidak melakukan kompetisi pada arena yang sama, disebabkan kesempatan serta kapasitasnya mereka terkendala norma serta nilai gender. Disamping itu, praktik serta kebijakan sosial yang sensitif gender, semestinya melakukan pemberdayaan supaya kelompok serta individu masyarakat pada akar rumput dengan sah bisa berkontribusi pada transformasi sosial. Secara fundamental eksistensi perempuan acapkali dipandang menjadi kelompok rendah ataupun lemah, tidak mandiri serta memiliki ketergantungan terhadap laki-laki, sementara perspektif seperti ini memperoleh legitimasi yang kuat yang memihak terhadap budaya patriarki (Juwianti dan Adawiyah, 2024).

Partisipasi perempuan dalam pengelolaan HKM masih tergolong rendah, terutama dalam tahapan strategis seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat. Studi Nur dan Arafah (2023) menunjukkan bahwa perempuan hanya menyumbang 10,3% dari total waktu kerja dalam pengelolaan dan 11,34%

dalam pengambilan keputusan, sehingga keterlibatan perempuan sangat terbatas, baik dalam aspek operasional maupun kelembagaan (Rusadi, 2026). Temuan serupa dikemukakan oleh Pratama dan Rijanta (2021), yang menyatakan bahwa pelaksanaan HKm secara formal melibatkan partisipasi perempuan serta laki-laki, namun pada praktiknya masih terjadi ketimpangan peran. Perempuan cenderung dibatasi oleh konstruksi sosial yang menempatkan pada posisi terbawah, terutama dalam pengambilan keputusan yang didominasi oleh laki-laki.

Salah satu masyarakat hutan yang memanfaatkan kawasan HKm adalah petani di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Keputusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara (2021), pemerintah telah menerbitkan izin persetujuan pengelolaan HKm kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sari Hutan dengan Nomor Surat Keputusan yaitu SK.049/KB/II//2021. Penelitian mengenai peran perempuan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek tradisi, peran serta ragam kontribusi perempuan pada lingkup rumah tangga. Sementara itu, kajian yang menyoroti kontribusi perempuan pada pengelolaannya hutan, secara khusus pada Hutan Kemasyarakatan (HKm), masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dijalankan guna mengidentifikasi tingkat keterlibatan perempuan serta faktor-faktor yang memengaruhi peran mereka dalam pengelolaan HKm.

## **METODE**

### **Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-November mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data 2025 hingga penyusunan tugas akhir pada bulan Maret 2026, berlokasi di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh perempuan yang terlibat dalam pengolahan HKm khususnya di KTH Sari Hutan di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan dua teknik. Untuk penentuan responden menggunakan metode sensus (census sampling) yaitu pengambilan seluruh populasi sebagai sampel penelitian dikarenakan jumlah populasi kurang dari 50 (Nia, 2023).

Sample dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 7 orang anggota, dan untuk penentuan informan memakai metode (purposive sampling) (memilih informan berlandaskan kriteria tersendiri yang relevan dengan kebutuhan penelitian). Adapun kriteria responden dan informan yaitu:

1. Kriteria responden (sensus) yang dimaksudkan yaitu, perempuan yang terlibat langsung di KTH Sari Hutan.
2. Kriteria informan (purposive sampling) yang dimaksudkan yaitu, anggota KTH Katengkong.

## Metode Pengumpulan Data

Pemilihan metode ini didasari terhadap peran perempuan dalam pengelolaan HKM. Teknik pengumpulan data yang dijalankan diantaranya:

1. Observasi lapangan, dipakai untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang dijalankan dengan langsung di lapangan dengan mengamati terkait dengan peran perempuan di Kelurahan Bokin.
2. Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan lewat metode tatap muka, yang mana satu pihaknya berperan menjadi pewawancara serta pihak lainnya menjadi narasumber dengan maksud mendapatkan informasi ataupun data tersendiri.
3. Studi Kepustakaan, metode penelitian yang bermaksud guna menghimpun data dan informasi melalui berbagai sumber tertulis yang berupa data kelompok tani dan SK pengukuhan HKM.
4. Dokumentasi, dilakukan untuk memberi gambaran mengenai penelitian seperti kegiatan wawancara responden dan keadaan umum lokasi penelitian untuk memperkuat data-data peneliti.

## Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode analisa data dijelaskan pada ragam bentuk skoring dalam pengelolaan HKM dalam aktivitas tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, serta tata kelola usaha yakni dilakukan penentuannya lewat skoring 3 yang memakai skala likert. Kalkulasi skor dilaksanakan lewat skala pengukuran yang dijalankan sebagaimana berikut (Pratiwi, 2018):

- a. TT = Tidak Terlibat diberi skor 0
- b. KrT = Kurang Terlibat diberi skor 1
- c. CT = Cukup Terlibat diberi skor 2
- d. KT = Keterlibatan Tinggi diberi skor 3

Tabel 1. Tingkat keterlibatan

Tingkat Keterlibatan	Interval skor	Bobot	Kriteria
Tata Kelola Kawasan	0 – 12	4	48
Tata Kelola Usaha	0 – 12	3,5	42
Tata Kelola Kelembagaan	0 – 12	2,5	30
Jumlah			0-120

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Pemberian bobot ini dilandaskan dari penelitian dari (Narsiki, 2017), yang mana diamati melalui waktu kerja, kontribusinya perempuan lebih banyak keterlibatannya dalam tata kelola kawasan, berikutnya tata kelola usaha serta terakhir tata kelola kelembagaan.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat keterlibatan

Tingkat Keterlibatan	Nilai
Tinggi	81 – 120
Sedang	41 – 80
Kurang	0 – 40

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

### 1. Tingkat Keterlibatan (Skoring Dasar)

Pengukuran tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm dilakukan menggunakan metode skoring dengan skala likert. Bagian ini menjelaskan cara mengukur keterlibatan perempuan menggunakan skala likert 0-3, yaitu (Pratiwi, 2018):

- a) 3 = Keterlibatan Tinggi (KT)
- b) 2 = Cukup Terlibat (CT)
- c) 1 = Kurang Terlibat (KrT)
- d) 0 = Tidak Terlibat (TT)

Skor maksimum setiap aspek diperoleh dari jumlah pertanyaan dikalikan dengan skor tertinggi (3). Setiap aspek terdiri dari 4 indikator pertanyaan, adapun interval skor 0-12 diperoleh dari: 4 (pertanyaan)  $\times$  3 (Skor tertinggi) = 12. Dengan demikian, sebelum dilakukan pembobotan, setiap aspek memiliki rentang nilai 0-12.

### 2. Kriteria dan Pembobotan

Bobot diberikan karena tingkat intensitas kerja perempuan berbeda pada tiap aspek (Narsiki, 2017) :

- a) Tata kelola kawasan : bobot 4 (paling dominan secara waktu kerja)
- b) Tata kelola usaha : bobot 3,5 (cukup dominan)
- c) Tata kelola kelembagaan : bobot 2,5 (paling rendah keterlibatannya)

Skor maksimum masing-masing aspek setelah pembobotan sehingga:

- a)  $12 \times 4 = 48$
- b)  $12 \times 3,5 = 42$
- c)  $12 \times 2,5 = 30$

Total skor maksimum keseluruhan = 120 Kemudian 120 dibagi 3 kategori:

- a) 0 – 40 = Kurang
- b) 41 – 80 = Sedang
- c) 81 – 120 = Tinggi

Artinya kategori ini bukan berdasarkan presentase, tetapi berdasarkan pembagian skor total. Untuk skor 10 –12 dikategorikan tinggi, rentan ini dibuat untuk mengelompokkan tingkat keterlibatan per aspek:

- a) 10 – 12 = Keterlibatan Tinggi
- b) 7 – 9 = Cukup Terlibat
- c) 4 – 6 = Kurang Terlibat
- d) 0 – 3 = Tidak Terlibat

Artinya, jika seorang responden rata-rata menjawab “Tinggi” (skor 3) di hampir semua pertanyaan, maka totalnya akan mendekati 12, sehingga masuk kategori tinggi.

### 3. Nilai Skor Tata Kelola Hutan

Setelah diperoleh skor dasar pada masing-masing aspek, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai akhir keterlibatan perempuan secara keseluruhan (Narsiki, 2017) :

- a) Ambil skor hasil kuisioner tiap responden
- b) Kalikan dengan bobot masing-masing aspek
- b) Jumlahkan seluruh skor
- c) Cocokkan dengan kategori (Kurang/Sedang/Tinggi).

Total skor maksimum keseluruhan adalah 120, hasil akhir ini menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan secara menyeluruh dalam pengelolaan HKM pada KTH Sari Hutan, baik dalam aspek teknis maupun kelembagaan yang kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) 0 – 40 = Rendah
- b) 41 – 80 = Sedang
- c) 81 – 120 = Tinggi

### 4. Presentase Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Hutan

Persentase keterlibatan perempuan dalam tata kelola hutan dihitung untuk mengetahui proporsi kontribusi masing-masing aspek, yaitu tata kelola kawasan, tata kelola usaha, dan tata kelola kelembagaan, terhadap total keterlibatan keseluruhan.

*Persentase aspek = Skor aspek*

*Total skor seluruh aspek*

× 100%

Keterangan:

Skor aspek = Hasil pembobotan masing-masing aspek

Total skor seluruh aspek = Jumlah seluruh skor dari tiga aspek

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kelurahan Bokin berada di wilayah Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan berada pada  $-3^{\circ}1'35''$  S dan  $-109^{\circ}58'59''$  E, dengan luas 203,5 ha yang terbagi atas empat lingkungan yaitu : Lingkungan Turunan, Lingkungan Ulusalu, Lingkungan Bamba, dan Lingkungan Pangra'pa'. Daerah ini berbatasan langsung dengan Lembang Nanna dan Lembang Basokan di sebelah utara, Kelurahan Buangin di sebelah selatan, Lembang Sapan Kua-kua Paniki di sebelah Barat, dan Lembang Makkampare di sebelah timur. Daerah ini memiliki ketinggian 800-1200 mdpl dengan kelerengan 40%-45% dan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung (Riskayanti, 2023).

## Karakteristik Responden

### 1. Umur

Umur menjadi satu diantara beragam faktor yang memberikan determinansi pendapatannya seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, responden dalam penelitian ini mempunyai usia 33-79 tahun. Susunan penggolongan usia anggota KTH Sari Hutan tersebut untuk lebih jelasnya bisa diamati dalam tabel 3.

Tabel 3. Usia Responden

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	33-44	2	28,5
2	45-56	3	43
3	57-68	0	0
4	69-80	2	28,5
	Total	7	100

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 3, dipahami bahwasanya umur responden KTH Sari Hutan sebagian besar termasuk kedalam golongan usia produktif yaitu usia (45-56) tahun dengan persentase 43%. Rentang umur tersebut tergolong sebagai kelompok masyarakat usia produktif cenderung ke arah paruh baya atau produktif tua yang artinya usia tersebut cenderung sudah memiliki banyak pengalaman dan keterampilan. Menurut Andriani et al., (2024), pengelompokan umur dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu usia produktif tua, usia produktif muda, serta usia non-produktif. Kelompok usia 20–40 tahun termasuk usianya produktif muda, usia 41–60 tahun tergolong usianya produktif tua, sedangkan di atas 60 tahun diklasifikasikan sebagai usianya non-produktif.

Petani yang ada di usia produktif umumnya mempunyai kemampuan kerja yang lebih optimal dibandingkan mereka yang sudah berusia non-produktif. Kekuatan fisik dan stamina yang baik pada usia produktif ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan usaha tani. Selain itu, petani dengan usia produktif biasanya memiliki tanggung jawab keluarga yang mendorong mereka untuk lebih giat mengelola hutan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, ketergantungan terhadap hasil hutan dapat berkurang apabila mereka menerapkan strategi diversifikasi seperti mengembangkan usaha di bidang pertanian, peternakan, atau perdagangan.

### 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan ialah jenjang pendidikan formal yang telah dilewati responden. Jikalau tingkatan pendidikannya bertambah meningkat, atas dasar tersebut pemahaman, keterampilan, serta pengetahuannya responden terkait usahatani bertambah baik (Hikmah et al., 2022). Berikut data tingkatan pendidikan yang divisualisasikan pada tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	3	42,8
SMP	1	14,3
SMA	2	28,6
Sarjana (D3/S1)	1	14,3
Total	7	100

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dalam tabel 4, dipahami bahwasanya sebagian besar responden KTH Sari Hutan dengan persentase (42,8%) dengan jumlah 3 responden yang sebatas menempuh pendidikan sampai tingkatan Sekolah Dasar (SD), sehingga dapat dikategorikan sebagai tingkat pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan karena keterbatasan biaya, prasarana serta sarana yang kurang memadai, serta jarak tempuh yang jauh antara Desa dengan Kota yang membatasi akses menuju pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut selaras sebagaimana perspektifnya Febrianti et al., (2023), yang memaparkan bahwasanya tingkatan pendidikan yang rendah bisa berpengaruh pada produktivitas kerja individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang semakin luas serta kesadaran akan krusialnya produktivitas, yang memberikan dorongan mereka untuk melakukan tindakan yang lebih produktif dalam beragam bidang, tak terkecuali pada pengelolaan sumber daya alam serta aktivitas usaha tani hutan. Pendidikan hingga tingkat SMP dan tingkat sarjana memiliki persentase (14,3%) dengan jumlah responden masing-masing 1 dan adapun tingkat pendidikan SMA memiliki persentase (28,6%) dengan jumlah responden 2.

### 3. Luas Lahan Responden dalam Kawasan HKm

Tabel 5. Luas Lahan Responden dalam Kawasan HKm

No.	Nama Responden	Luas (ha)
1	Responden 1	2
2	Responden 2	2
3	Responden 3	2,5
4	Responden 4	2
5	Responden 5	3
6	Responden 6	1
7	Responden 7	1
	Rata-rata	1,9

(Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan tabel no 5, luas lahan yang dikelola berpengaruh terhadap intensitas keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha tani hutan. Berdasarkan data luas garapan HKm, diketahui bahwa 7 responden merupakan anggota KTH Sari Hutan yang masing-masing mengelola lahan seluas  $\pm 1$  hektar. Luas garapan tertinggi tercatat sebesar 3 ha dan terendah 1 ha.

#### 4. Pendapatan

Tabel 6. Pendapatan Responden dari Pemanfaatan lahan HKm dan kegiatan ekonomi

No.	Nama Responden	Pendapatan (Rp)/bulan
1	Responden 1	Rp1.000.000 - 2.000.000
2	Responden 2	Rp1.000.000 - 2.000.000
3	Responden 3	Rp100.000
4	Responden 4	Rp500.000 - 1.000.000
5	Responden 5	Rp500.000
6	Responden 6	Rp100.000
7	Responden 7	Rp300.000
Rata-rata		Rp679.000

(Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 6, pendapatan langsung masyarakat dianalisis untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh anggota kelompok dari kegiatan pengelolaan HKm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan mereka tidak murni berasal dari pemanfaatan lahan HKm saja, tetapi juga dari pekerjaan sampingan lain mereka di luar pengelolaan HKm yang mereka lakukan secara mandiri, seperti menjadi buruh panen kopi di PT Tuarco Jaya, wiraswasta dan menjadi aparat Desa/staf Desa. Kebanyakan perempuan yang tinggal di Kelurahan Bokin tentunya pendapatan yang mereka dapatkan itu berasal dari pekerjaan sampingan yang mereka peroleh itu sebagai buruh di PT Tuarco, akan tetapi hal ini tidak menjadi faktor penghambat utama keterlibatan mereka dalam pengelolaan HKm, dari 7 responden itu memang pada dasarnya ada yang kerja di PT Tuarco tetapi tidak secara rutin dan hal ini tidak mengganggu aktifitasnya dalam pengelolaan HKm. Justru dengan begitu mereka lebih banyak mendapat pengalaman dan mengimplementasikannya di lahannya masing-masing.

Hal ini mencerminkan beragamnya kontribusi ekonomi HKm terhadap masyarakat, tergantung pada tingkat keterlibatan dan jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing anggota. Secara keseluruhan, hasil yang didapatkan melalui proses wawancara menunjukkan bahwa pendapatan anggota kelompok tidak sepenuhnya bergantung pada pemanfaatan lahan HKm. Penghasilan tambahan dari kegiatan ekonomi di luar HKm ialah satu diantara beragam strategi adaptasi masyarakat untuk melakukan pemenuhan keperluan ekonomi rumah tangga, terutama bagi anggota yang belum memperoleh hasil optimal dari kegiatan HKm.

## Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan HKM

### 1. Tingkat Keterlibatan Perempuan Pada Kegiatan Tata Kelola Kawasan

Tabel 7. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Kawasan

Keterlibatan	Nilai Skor	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Keterlibatan Tinggi (KtT)	10 – 12	6	85,8
Cukup Tinggi (CT)	7 – 9	1	14,2
Kurang Terlibat (KT)	4 – 6	0	0
Tidak Terlibat (TT)	0 – 3	0	0
Jumlah		7	100

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwasanya tingkatan keterlibatan perempuan pada aktivitas tata kelola kawasan pada KTH Sari Hutan tergolong tinggi, dengan persentase 85,8 % dengan total 6 responden, meskipun terdapat 1 responden yang keterlibatannya cukup terlibat dengan persentase 14,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perempuan anggota kelompok turut serta secara aktif dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Tingginya tingkat keterlibatan ini ditunjukkan melalui partisipasi mereka pada berbagai kegiatan seperti penanaman, penyiangan rumput, pembersihan lahan, penggemburan tanah, pemanenan sampai dengan pengangkutan hasil hutan. Keterlibatan perempuan pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki kontribusi krusial pada ranah merawat serta menjaga kawasan hutan agar tetap produktif. Tingginya keterlibatannya perempuan pada tata kelola kawasan ini tidak lepas dari adanya pembagian kerja yang alami di dalam kelompok tani, di mana perempuan umumnya berperan pada tahap-tahap perawatan tanaman dan pengelolaan lahan yang membutuhkan ketelitian dan kedisiplinan. Selain itu, faktor kedekatan perempuan dengan sumber daya hutan seperti pemanfaatan HHBK (kopi, aren, coklat dan cengkeh) juga memperkuat partisipasi mereka dalam kegiatan lapangan.

“Kalau di lapangan, justru ibu-ibu yang lebih rajin. Mereka ikut tanam kopi, bersihkan rumput, dan bantu bawa hasil panen” (kutipan informan 4).

“Kami memang biasa turun langsung di lahan, karena pekerjaan seperti menyiangi dan membersihkan itu sudah terbiasa dikerjakan perempuan. Kitakan tinggal dikampung yah, dikampung itu kebanyakan kita bergantung dari hasil tani kita, nah itu semua butuh proses dan pengalaman tentunya” (kutipan informan 2).

Dari hasil observasi lapangan, terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan kawasan HKM didorong oleh kedekatan mereka dengan sumber daya alam di sekitar tempat tinggalnya serta tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lahan. Dengan demikian, secara umum perempuan di KTH Sari Hutan memiliki tingkatan keterlibatannya yang tinggi pada aktivitas tata kelola kawasan baik dari segi tenaga, waktu, maupun komitmen terhadap keberlanjutan HKM di Kelurahan Bokin.

## 2. Tingkat Keterlibatan Perempuan Pada Kegiatan Tata Kelola Kelembagaan

Tabel 8. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Kelembagaan

Keterlibatan	Nilai Skor	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Keterlibatan Tinggi (KtT)	10 – 12	3	42,9
Cukup Tinggi (CT)	7 – 9	3	42,9
Kurang Terlibat (KT)	4 – 6	1	14,2
Tidak Terlibat (TT)	0 – 3	0	0
Jumlah		7	100

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 8, tingkat keterlibatan perempuan dalam tata kelola kelembagaan menunjukkan variasi yang lebih beragam dibandingkan aspek sebelumnya. Dari 3 responden, dengan persentase 42,9% begitupun perempuan yang termasuk dalam kategori keterlibatan tinggi dengan persentase 42,9% berada pada kategori cukup terlibat, dan ada 1 responden dengan persentase 14,2% tergolong kurang terlibat. Bobot rendah bukan berarti aspek kelembagaan tidak penting, tetapi mencerminkan kondisi nyata bahwa keterlibatan perempuan di aspek ini memang kecil. Hasil ini tentunya menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perempuan sudah cukup aktif dalam kegiatan kelembagaan, akan tetapi masih terdapat anggota yang partisipasinya terbatas. Perempuan yang tergolong aktif biasanya terlibat dalam rapat kelompok, memberikan pendapat dalam pertemuan, dan berkontribusi dalam kegiatan administrasi organisasi. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pada posisi kepengurusan inti, seperti ketua, masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan sosial bahwa laki-laki dianggap lebih layak untuk memimpin, sementara perempuan lebih diarahkan pada peran pendukung atau administratif. Menurut Juwianti dan Adawiyah (2024), keterlibatan perempuan dalam kelembagaan perhutanan sosial sering kali terhambat oleh faktor budaya dan norma patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan dalam kegiatan publik. Kondisi ini juga ditemukan di KTH Sari Hutan, di mana partisipasi perempuan

dalam struktur kelembagaan cenderung bersifat simbolis dan belum sepenuhnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis.

Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam pandangan terhadap kemampuan perempuan di ruang kelembagaan, meskipun belum sepenuhnya setara. "Intinya begini, kita sesuaikanlah kalau yang paling tidak yang berbakat kita sesuaikan dibidangnya asal dia mau, kita bisa kasih masuk. Saya lihat sekarang ibu-ibu juga banyak yang mampu, tinggal didorong saja supaya lebih percaya diri." (kutipan informan 1).

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa perempuan sudah memiliki peran nyata dalam kegiatan kelembagaan, namun masih memerlukan penguatan kapasitas dan keberanian untuk mengambil peran strategis di tingkat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan agar dapat berperan lebih aktif dan setara dalam kelembagaan HKM di masa mendatang.

### 3. Tingkat Keterlibatan Perempuan Pada Kegiatan Tata Kelola Usaha

Tabel 9. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Usaha

Keterlibatan	Nilai Skor	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Keterlibatan Tinggi (KtT)	10 – 12	6	85,8
Cukup Tinggi (CT)	7 – 9	1	14,2
Kurang Terlibat (KT)	4 – 6	0	0
Tidak Terlibat (TT)	0 – 3	0	0
Jumlah		7	100

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 9, dipahami bahwasanya tingkatan keterlibatannya perempuan pada aktivitas tata kelola usaha pada KTH Sari Hutan juga termasuk dalam keterlibatan tinggi, dengan nilai persentase 85,8 % dengan total 6 responden, meskipun terdapat 1 responden yang keterlibatannya cukup terlibat dengan persentase 14,2%. Hal ini memperlihatkan bahwasanya hampir seluruh perempuan anggota kelompok aktif berpartisipasi pada aktivitas yang berkaitan dengan usaha pengelolaan hasil hutan. Kegiatan yang diikuti meliputi pengolahan hasil hutan menjadi produk siap konsumsi seperti kopi bubuk, proses pengemasan, hingga kegiatan pemasaran produk. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan kelompok. Perempuan berperan penting dalam menjaga mutu produk serta mengatur proses pengemasan yang menarik, yang merupakan bagian dari strategi pemasaran HHBK. Kondisi ini selaras sebagaimana resultan penelitian Pratiwi (2018) dan Rusadi (2026), yang memaparkan bahwasanya perempuan memiliki peran dominan dalam proses operasional, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam aspek strategis usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tata kelola usaha bersifat produktif dan berorientasi pada kegiatan praktis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan kelompok, meskipun partisipasi dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Dari wawancara mendalam justru perempuan lebih banyak terlibatnya baik dari segi operasional bahkan dari segi aspek strategis karena perempuan yang tau betul soal pengelolaan seperti negosiasi harganya bahkan penentuan pasarnya dan tentunya untuk pengolahan kopi dari biji menjadi bubuk itu semua perempuan yang kerjakan.

#### 4. Tingkat Keterlibatan Perempuan Pada Kegiatan Tata Kelola Hutan

Berdasarkan ketiga aspek pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu tata kelola usaha, tata kelola kawasan, serta tata kelola kelembagaan, terlihat bahwa tingkat keterlibatan perempuan bervariasi pada setiap aspek, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pembahasan sebelumnya. Perempuan yang terlibat dalam pengelolaan HKm hampir semuanya ikut terlibat aktif dalam tata kelola kawasan maupun tata kelola usaha hanya saja kurang terlibat dalam aspek pengelolaan kelembagaan, hal ini yang bisa mempengaruhi responden dalam tingkat keterlibatannya mereka dalam pengelolaan HKm. Selanjutnya, tabel 12 menyajikan rekapitulasi tingkat keterlibatan perempuan secara keseluruhan dalam pengelolaan HKm.

Tabel 10. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Hutan

Nilai Keterlibatan	Kriteria Keterlibatan Perempuan	Jumlah Responden (orang)	Persentas (%)
81 –120	Tinggi	6	85,8
41 – 80	Sedang	1	14,2
0 – 40	Rendah	0	0
Jumlah		7	100

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan data yang terlampir jika dilihat pada hasil rekapitulasi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm pada tabel 10, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perempuan mempunyai tingkatan keterlibatannya yang tinggi pada seluruh aspek kegiatan, baik dalam tata kelola kawasan, tata kelola usaha, adapun pada aspek tata kelola kelembagaan, meskipun sebagian besar perempuan telah menunjukkan keterlibatan yang baik, masih terdapat variasi partisipasi di antara responden. Hal ini ditunjukkan dari data-data dan pembahasan sebelumnya yang memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan anggota KTH Sari Hutan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan. Pada kegiatan tata kelola kawasan, 6 orang responden dengan persentase 85,8% berada pada kategori keterlibatan tinggi, yang menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam kegiatan lapangan seperti penanaman, penyiangan, pemanenan sampai dengan pengangkutan

hasil hutan. Selanjutnya, pada kegiatan tata kelola usaha, tingkat keterlibatan perempuan juga tergolong tinggi dengan persentase 85,8%, yang terlihat dari peran mereka dalam pengolahan hasil hutan, proses pengemasan, serta kegiatan pemasaran produk HHBK. Sementara itu, pada kegiatan tata kelola kelembagaan, meskipun sebagian besar perempuan tergolong aktif 42,9% dalam kategori tinggi, namun masih terdapat sebagian kecil yang tingkat keterlibatannya cukup atau kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelembagaan telah berkembang, meskipun masih perlu ditingkatkan terutama dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perempuan di KTH Sari Hutan berperan penting dan berkontribusi nyata terhadap keberhasilan pengelolaan HKM di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.

### 5. Presentase Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Hutan

Dalam tata kelola hutan, peran perempuan tidak terlihat terpisah, tetapi dibandingkan antar tiga aspek yakni: (tata kelola usaha, tata kelola kawasan, serta tata kelola kelembagaan). Jika ketiga aspek tata kelola disandingkan secara proporsional menjadi 100%, maka perhitungannya dilakukan berdasarkan total skor berbobot masing-masing aspek dibandingkan dengan total keseluruhan skor. Untuk menentukan yang paling dominan ketiganya dinormalkan menjadi 100% (Narsiki, 2017).

Tabel 11. Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Hutan

Aspek Tata Kelola	Nilai Skor	Persentase (%)
Tata Kelola Kawasan	296	41,7
Tata Kelola Usaha	259	36,5
Tata Kelola Kelembagaan	155	21,8
Jumlah	710	100

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Berdasarkan resultan normalisasi ketiga aspek tata kelola, peran perempuan paling tinggi berada dalam tata kelola kawasan (41,7%), diikuti tata kelola usaha (36,5%), dan terendah pada tata kelola kelembagaan (21,8%). Hal ini menunjukkan bahwa secara proporsional peran perempuan paling dominan berada pada tata kelola kawasan, berikutnya usaha, serta paling rendah pada kelembagaan. Hal ini juga konsisten dengan temuan lapangan bahwa perempuan lebih banyak terlibat pada kegiatan teknis dan produktif dibandingkan pada pengambilan keputusan kelembagaan.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan HKm**

### **1. Faktor Sosial**

Faktor sosial memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm Sari Hutan di Kelurahan Bokin. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informan, sebagian masyarakat di sekitar kawasan HKm masih memiliki pandangan bahwa kegiatan pengelolaan hutan, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan dan pengambilan keputusan, lebih pantas dilakukan oleh laki-laki. Pandangan ini didasari oleh asumsi bahwasanya laki-laki mempunyai kemampuan kepemimpinan dan kekuatan fisik yang lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Hal ini selaras sebagaimana penelitian Juwianti dan Adawiyah (2024) yang menyatakan bahwa norma sosial dan budaya patriarki masih menjadi penghambat utama bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan publik termasuk pada pengelolaannya perhutanan sosial.

Masyarakat yang hidup disekitar kawasan HKm masih berfikir bahwa yang mampu mengelola sesuatu, seperti menjadi ketua dalam organisasi hanya pria, padahal dari penelitian yang dilakukan, setidaknya ada satu orang perempuan yang ikut berperan aktif dalam berbagai organisasi khususnya menjadi ketua. Selain pandangan sosial yang membatasi, sebagian perempuan juga merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri untuk terlibat aktif dalam pengelolaan HKm. Hal ini tampak dari jawaban beberapa responden perempuan yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih membantu di lapangan atau dalam kegiatan usaha dari pada mengurus administrasi kelompok. Pandangan ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial tidak hanya datang dari pihak laki-laki, tetapi juga tertanam dalam diri perempuan itu sendiri, yang menganggap bahwa mereka kurang cakap dalam hal kepemimpinan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Rusadi, 2026) bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kahayya masih berada pada posisi marginal, dengan dominasi laki-laki dalam kegiatan teknis, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Perempuan terlibat dalam kegiatan fisik seperti penanaman dan panen, tetapi tidak memiliki akses dan kontrol yang setara dalam kelembagaan maupun distribusi manfaat.

Kepemilikan lahan juga termasuk faktor sosial yang memberikan determinansi atas keterlibatannya perempuan pada pengelolaannya HKm. Kepemilikan lahan pada KTH Sari Hutan masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan yang memiliki lahan atas namanya sendiri umumnya adalah janda atau kepala keluarga perempuan. Hal ini selaras sebagaimana resultan penelitian Andriani (2024) yang memaparkan bahwasanya kepemilikan lahan ialah satu diantara beragam aspek fundamental yang memberikan determinansi tingkatan keterlibatannya perempuan pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, faktor sosial seperti pandangan budaya patriarki, dan keterbatasan kepemilikan lahan menjadi penghambat utama keterlibatan perempuan secara penuh dalam pengelolaan HKM di Kelurahan Bokin. Namun demikian, adanya beberapa perempuan yang sudah mulai aktif di kegiatan kelembagaan dan usaha menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan hutan mulai tumbuh, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan berperspektif gender.

Berdasarkan data lapangan meskipun juga nama laki-laki lebih dominan terlampir di SK Kelurahan Bokin, tidak menutup kemungkinan perempuan lebih dominan dalam mengelola lahannya. Dikarenakan terkadang suaminya lebih mementingkan mengerjakan pekerjaan sampingannya seperti buruh bangunan dan sebagainya ketimbang mengurus lahannya serta terdapat beberapa perempuan di KTH Sari Hutan yang telah aktif terlibat dalam kegiatan kelembagaan, seperti menghadiri rapat kelompok, menyampaikan pendapat, dan membantu dalam kegiatan administrasi. Seperti dalam posisi kepengurusan inti seperti sekretaris dan bendahara kelompok itu perempuan yang ambil alih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KTH Sari Hutan, keputusan ini merupakan hasil bahwa perempuan juga sebenarnya mampu hanya saja belum diberi ruang kebebasan.

## 2. Faktor Pendidikan

Selain faktor pandangan sosial, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu aspek sosial yang memengaruhi keterlibatan perempuan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan perempuan memahami pengelolaan hutan dan mengambil keputusan dalam kelompok. Perempuan dengan pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang konservasi, tata kelola usaha, serta administrasi kelompok. Namun, sebagian besar responden hanya menempuh pendidikan hingga SD-SMP (57,1%), sehingga pemahaman mereka tentang peran kelembagaan masih terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan perempuan kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat saat rapat kelompok. Hal ini selaras sebagaimana pandangan Febrianti et al. (2023) yang memaparkan bahwasanya pendidikan yang rendah berdampak pada produktivitas dan partisipasi kerja, termasuk dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden perempuan di KTH Sari Hutan hanya berpendidikan SD-SMP, yaitu sebesar 57,1%, sedangkan laki-laki sebagian besar berpendidikan SMA. Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan perempuan kurang percaya diri dalam mengambil keputusan dan cenderung pasif dalam kegiatan kelembagaan. Hal ini selaras sebagaimana pandangannya Febrianti et al., (2023) yang menjelaskan bahwasanya rendahnya pendidikan membuat perempuan sulit terlibat aktif di ruang publik karena dianggap kurang mampu dalam mengambil keputusan.

### 3. Faktor Kelembagaan

Peran kelembagaan KTH sangat penting dalam membuka ruang partisipasi bagi perempuan. Di KTH Sari Hutan, perempuan telah terlibat sebagai sekretaris dan bendahara, namun posisi ketua masih dominan laki-laki. Struktur organisasinya yang belum sepenuhnya inklusif menyebabkan keterlibatan perempuan pada pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Menurut Juwianti dan Adawiyah (2024), hambatan struktural dan budaya patriarki sering membuat perempuan hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, bukan pengambil keputusan.

Penguatan kapasitas kelembagaan yang sensitif gender diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan setara dalam memimpin dan menentukan arah kegiatan kelompok. Struktur organisasi KTH Sari Hutan yang masih didominasi laki-laki pada posisi strategis menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi perempuan dalam tata kelola kelembagaan (21,8%). Meskipun terdapat perempuan yang menjabat sebagai sekretaris dan bendahara, peran pengambilan keputusan utama masih cenderung berada di tangan laki-laki.

### 4. Faktor Ekonomi

Motivasi ekonomi menjadi salah satu pendorong utama keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKM. Sebagian besar responden memiliki tanggungan keluarga dan mengandalkan hasil hutan seperti kopi, aren, dan cengkeh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, perempuan memperoleh tambahan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Temuan ini selaras sebagaimana Saputra et al., (2024) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan kehutanan berperan penting dalam mendukung ekonomi hijau berkelanjutan. Semakin tinggi kontribusi ekonomi yang dirasakan, semakin besar pula motivasi perempuan untuk aktif dalam setiap kegiatan kelompok. Semakin besar kebutuhan ekonomi keluarga, semakin tinggi pula partisipasi perempuan dalam aktivitas produktif. Namun, karena tata kelola kelembagaan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung, minat dan intensitas keterlibatan perempuan pada aspek ini relatif lebih rendah (21,8%).

## KESIMPULAN

Tingkat keterlibatan perempuan di KTH Sari Hutan sebagian besar tergolong tinggi dalam pengelolaan HKM di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil normalisasi kontribusi terbesar perempuan itu berada pada aspek tata kelola kawasan (41,7%) dan tata kelola usaha (36,5%), sedangkan pada tata kelola kelembagaan relatif lebih rendah (21,8%). Perempuan berperan aktif dalam kegiatan teknis seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), namun masih terbatas dalam pengambilan keputusan strategis karena dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan.

Keterlibatan perempuan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya (patriarki), tingkat pendidikan yang relatif rendah (SD-SMP), struktur kelembagaan kelompok, serta dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara keseluruhan, perempuan memiliki kontribusi nyata terhadap keberlanjutan pengelolaan HKM, meskipun penguatan kapasitas dan akses kepemimpinan masih diperlukan untuk mencapai kesetaraan yang lebih optimal.

## REFERENSI

- Apriani, A. A. 2026. Peran Gender Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hkm Dan Htr Di Kabupaten Sarolangun (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Andriani, S., Setiawan, B., & Lestari, A. T. 2024. Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan Kemasyarakatan Lembah Sempager Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 5 (3): 517-525.
- Atmojo, T., Yuniyanto, A. S., & Anggraeni, B. W. 2024. Peran Gender Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Gender Role In Forest Area Management In Gading District, Probolinggo District, East Java). *Menara Ilmu. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*: 18(2).
- Basir, B. N., Dassir, M., & Makarennu. 2020. Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hkm Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*: 39-48.
- Dwiyanita, E., Chainar, Sikwan, A., Purnama, D. T., & Marini. 2024. Peran Kelompok Matahari dalam Pengelolaan Kawasan Hutan melalui Skema Hutan Desa dengan Program Perhutanan Sosial di Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Pengembangan Ekonomi*, 2 (2): 762-775.
- Amrul, D. 2026. Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8 (1): 2769-2773.
- Edwina, S., Maharani, E., Kusumawaty, Y., Yusri, J., & Yusmini. 2020. Analisis kelembagaan kelompok tani sistem integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Agrisepp*, 19 (1): 145-166.
- Fauzi, M., & Nahlunnisa, H. 2021. Studi Pengelolaan Hkm di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas*, 4 (1): 20-26.
- Febrianti, A., Shulthoni, M., Masrur, M., & Safi'i, M. A. 2023. Pengaruh tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja di Indonesia. *Sahmiyya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: 198-204.
- Hikmah, A. N., Dambe, J., & Dassir, M. 2022. Peranan Aset Nafkah Rumah Tangga Petani Kakao di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. *Media Agribisnis*, 6 (2): 137- 144.
- Juwianti, A., & Adawiyah, P. R. 2024. Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial

- terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1 (3): 9-9.
- Lenaini, 1. 2021. Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6 (1): 33-39.
- Lispiani, B. M., & Hidayati, E. 2022, June. Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Pada Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring Desa Mekar Sari Kabupaten Lombok Timur. In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia* (Vol. 1, No. 1, pp: 139- 147).
- Narsiki. 2017. Peran Gender Dan Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nia, M., & Ilham, M. 2023. Analisis Pendapatan Petani Jeruk Di Desa Kaimbulawa Kecamatan Siompu. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(4), 600-610.
- Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender Dan Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5 (1): 332-343.
- Nur, H. N. H., & Arafah, N. 2023. The Peran Gender Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Celebica. Jurnal Kehutanan Indonesia*, 4 (2): 239–249.
- Pratama, A. C., & Rijanta, R. 2021. Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Legal Reasoning*, 3 (2): 80–99.
- Pratiwi, W., & Markum, B. S. 2018. Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Dongo Baru Kabupaten Lombok Timur. Universitas Mataram.
- Riansyah, D. 2021. Panduan role model pendampingan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Riskayanti. 2023. Analisis Gender dalam Sistem Pengelolaan Agroforestri Berbasis Kopi (*Coffea*) di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. (skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. 2021. Penyuluhan perhutanan sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. Budimas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (2): 548-558.
- Rusadi, N. 2026. Peran Dan Keterlibatan Gender Dalam Skema Hutan Kemasyarakatan: Studi Kasus Di Desa Kahayya, Sulawesi Selatan. *Jurnal TAMBORA*, 9 (2): 51-56.
- Saputra, S., Wahyuni, S., Hasni, K., Amar, A., Fahmi, R., & Aisyah, A. 2024. Penguatan Peran Perempuan Dalam Mendukung Green Ekonomi Berkelanjutan. *JMM Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8 (6): 6129-6138.
- Simarmata, M. M., & Tarigan, W. J. 2023. Pengelolaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Ekowisata Oleh Kelompok Tani Hutan Di Nagori Sait Buttu Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3 (1):

33-43.

Raudhah, R., Hafizianor, H., & Asysyifa, A. 2021. Analisis Gender dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Ambungan dan Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari. *Jurnal Sylva Scientiae* , 4 (5): 831-841.